



BUPATI PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 180.18 / 1 TAHUN 2023

TENTANG

PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
TAHUN 2023

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang: a. bahwa guna tertib pelaksanaan penyusunan Peraturan Bupati Pekalongan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan dan melaksanakan ketentuan Pasal 12 dan Pasal 14 ayat (7) Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu ditetapkan Program Penyusunan Peraturan Bupati Pekalongan Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Program Penyusunan Peraturan Bupati Pekalongan Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6841);
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 79);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 97);
8. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2019 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Program Penyusunan Peraturan Bupati Pekalongan Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Program Penyusunan Peraturan Bupati Pekalongan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- KETIGA : Program Penyusunan Peraturan Bupati Pekalongan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU setelah ditetapkan dapat dilakukan penambahan atau pengurangan dengan terlebih dahulu mengajukan Nota Dinas sebagai penjelasan dan pertimbangan kebijakan kepada Bupati.
- KEEMPAT : Pemrakarsa melaporkan perkembangan realisasi penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Pekalongan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU setiap triwulan kepada Bupati melalui Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan.
- KELIMA : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan melakukan verifikasi dan evaluasi atas laporan perkembangan realisasi penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Pekalongan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT untuk selanjutnya dilaporkan kepada Bupati.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kajen
pada tanggal



Tembusan; disampaikan kepada, Yth.:

1. Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan
2. Sekretaris Daerah;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda;
4. Inspektur;
5. Kepala Bagian Hukum Setda;
6. Perangkat Daerah Pemrakarsa.

Lampiran Keputusan Bupati Pekalongan
 Nomor : 180.18 / 1
 Tanggal : 2 Januari 2023

PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
 TAHUN 2023

NO.	JUDUL	UNIT/PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA
1.	Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Penyaluran serta Pengelolaan Alokasi Dana Desa	DINAS PMD
2.	Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa Kabupaten Pekalongan	DINAS PMD
3.	Tata Naskah Dinas Untuk Desa	DINAS PMD
4.	Penetapan Batas Desa	DINAS PMD
5.	Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA)	DINAS PMD
6.	Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	BPKD
7.	Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	BPKD
8.	Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	BPKD
9.	Klasifikasi Besaran NJOP Bumi Berupa Tanah dan Bangunan Tahun 2024	BPKD
10.	Standar Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2024	BPKD
11.	Hibah dan Bantuan Sosial	BPKD
12.	Belanja Tidak Terduga	BPKD
13.	Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga belas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023	BPKD
14.	Analisis Standar Belanja (ASB)	BPKD
15.	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2024	BAPPEDA LITBANG
16.	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2024	BAPPEDA LITBANG
17.	Rencana Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun 2024	BAPPEDA LITBANG
18.	Rencana Induk Sistem Penyediaan Air	BAPPEDA LITBANG

NO.	JUDUL	UNIT/PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA
	Minum (RISPAM)	
19.	Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK)	BAPPEDA LITBANG
20.	Rencana Aksi Daerah SDGs 2023	BAPPEDA LITBANG
21.	Rencana Aksi Daerah Penanganan Anak tidak Sekolah	BAPPEDA LITBANG
22.	Rencana Aksi Daerah Penanganan Pangan dan Gizi	BAPPEDA LITBANG
23.	Pelaksanaan Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan di Wilayah Kabupaten Pekalongan	SATPOL PP DAN DAMKAR
24.	Manajemen Proteksi Kebakaran di perkotaan di Wilayah Kabupaten Pekalongan	SATPOL PP DAN DAMKAR
25.	Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.	INSPEKTORAT
26.	Perencanaan, Pembinaan, dan Pengawasan Tahun 2024.	INSPEKTORAT
27.	Pedoman Pengawasan Keuangan Daerah Desa	INSPEKTORAT
28.	Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	INSPEKTORAT
29.	Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	INSPEKTORAT
30.	Pedoman Pemeriksaan Pengaduan Masyarakat	INSPEKTORAT
31.	Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Pekalongan Tahun 2023	DINAS SOSIAL
32.	Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Kab/Kota	DINAS PM DAN PTSP
33.	Penanaman Modal	DINAS PM DAN PTSP
34.	Pemberian Insentif/kemudahan berusaha	DINAS PM DAN PTSP
35.	Usaha Pembudidayaan Ikan	DINLUTKAN
36.	Perubahan Tarif Retribusi Daerah	DINLUTKAN
37.	Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan dan Pemungutan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan	DINLUTKAN
38.	Pola Tata Tanam	DPU TARU
39.	Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)	DPU TARU
40.	Peraturan Pelaksanaan Perda No. 1 Tahun 2016	BPBD

NO.	JUDUL	UNIT/PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA
41.	Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas	DINAS PERHUBUNGAN
42.	Penyelenggaraan Terminal	DINAS PERHUBUNGAN
43.	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	DINAS PERHUBUNGAN
44.	Penyelenggaraan Parkir	DINAS PERHUBUNGAN
45.	Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor	DINAS PERHUBUNGAN
46.	Penyelenggaraan Angkutan Orang	DINAS PERHUBUNGAN
47.	Standar Pelayanan Pada Pengelola Layanan informasi dan Dokumentasi Kabupaten Pekalongan	DINKOMINFO
48.	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan	DINKOMINFO
49.	Pedoman Pola Hubungan Komunikasi Sandi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan	DINKOMINFO
50.	Arsitektur Aplikasi	DINKOMINFO
51.	Usaha Pembudidayaan Ikan	DINLUTKAN
52.	Perubahan Tarif Retribusi Daerah	DINLUTKAN
53.	Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan dan pemungutan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan	DINLUTKAN
54.	Standar Pelayanan pada Disdukcapil Kab Pekalongan	DISDUKCAPIL
55.	Perubahan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Kependudukan Berbasis Kewenangan Desa.	DISDUKCAPIL
56.	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan	BAGIAN ORGANISASI
57.	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan	BAGIAN ORGANISASI
58.	Uraian Tugas Jabatan Struktural, Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan	BAGIAN ORGANISASI
59.	Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan	BAGIAN ORGANISASI

NO.	JUDUL	UNIT/PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA
60.	Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan	BAGIAN ORGANISASI
61.	Pedoman Kode Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.	DINAS ARPUS


 BUPATI PEKALONGAN,
 FADIA ARAFIQ